



JGORO

Jurnal Gotong Royong

Volume 1 Issue 2, 2024 (79-88)

ISSN (online) : 3048-0744

Homepage : <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/goro>

Doi : <https://doi.org/10.37676/goro>

Program Kaliber (Kawal Pemilu Bersih) Di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang

Aryo Yasya Rachma¹, Sukmareni²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail ; ¹ aryoyasyarachma@gmail.com , ² sukmarenirajab@gmail.com

Received [15-08-2024]

Revised [20-09-2024]

Accepted [03-10-2024]

Abstract.. *This research aims to analyze the Clean Election Guard Program implemented in Koto Panjang Subdistrict, Padang Panjang Timur District, Padang Panjang City which focuses on discussing the form of socialization carried out and the obstacles encountered in guarding the 2024 Election. The research method used is field research with a qualitative approach. Data sources include primary data sources obtained directly from the field and secondary data sources from books, journals and scientific articles. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative data analysis methods. The results of this research conclude that the Clean Election Guard (Kaliber) Program in Koto Panjang Subdistrict, Padang Panjang Timur District, Padang Panjang City has been running effectively and efficiently in accordance with the desired objectives, namely to oversee the implementation of the 2024 Election which is honest, fair, clean and democratic.*

Keywords: *Kaliber, Election, Koto Panjang Subdistrict*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Kawal Pemilu Bersih yang dilaksanakan di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang berfokus membahas bentuk sosialisasi yang dilakukan serta hambatan yang ditemui dalam mengawal Pemilu 2024. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan dan sumber data sekunder dari buku, jurnal dan asrtikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang telah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yaitu untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bersih dan demokratis.

Kata Kunci: Kaliber, Pemilu, Kelurahan Koto Panjang

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia mempunyai mekanisme pemilihan wakil rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu sejatinya merupakan sarana kedaulatan rakyat guna memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdurrohman 2021).

Di Indonesia pelaksanaan Pemilu memiliki dasar hukum dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada mulai dari UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Peran Politik, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Bintar R. Saragih, pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi (Bintar R. Siragih 1998).

Di Indonesia, pemilihan umum dilangsungkan setiap 5 tahun sekali dan berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu tersebut diharapkan mampu menjembatani antara keinginan pemilih dengan kebijakan politik dari yang dipilih.

Oleh karenanya, penting memastikan proses penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan kehendak dari konstitusi (Feri Amsari Dkk 2021). Adapun urgensi dari dilaksanakannya Pemilu pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai legitimasi politik, dimana melalui pemilihan umum keabsahan suatu pemerintahan yang terpilih dapat ditegakkan.
2. Sebagai perwakilan politik, dimana melalui pemilihan umum rakyat bisa menentukan perwakilan yang bisa dipercaya guna menduduki jabatan legislative maupun eksekutif.
3. Sebagai sirkulasi elit penguasa, dimana pemilihan umum memiliki hubungan dengan sirkulasi elit penguasa. Dengan pemilihan umum, penguasa akan silih berganti dan tidak akan dimonopoli oleh satu orang/kelompok saja.
4. Sebagai sarana pendidikan politik, dimana pemilihan umum memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka pada masyarakat sehingga diharapkan menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis (Syamsuddin Haris 1997).

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, maka jelas bahwa Pemilihan umum sangat tinggi urgensinya untuk dilaksanakan secara jujur, adil, rahasia, bebas dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun dalam pelaksanaan Pemilu seringkali dinodai dengan berbagai bentuk kecurangan, salah satunya adalah politik uang (money politic). Padahal, politik uang sejatinya telah menciderai demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Politik uang merupakan terjemahan dari istilah "money politic" dalam sistem hukum Barat. Dalam Bahasa Indonesia, politik uang diidentikkan dengan suap. Istilah lain dari suap ialah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar (Umar 2015).

Masyarakat umum memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberikan iming-iming sesuatu, pada seseorang atau kelompok orang secara berkelompok maupun pribadi, guna memperoleh keuntungan secara politik dalam artian tindakan politik uang ini dilaksanakan dengan sadar oleh pelaku.

Politik uang sendiri merupakan upaya menyuap para pemilih dengan memberikan uang, barang ataupun jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan pada seorang penyuaup. Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena patronase dan klientelisme. Klientelisme merupakan bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara mereka. Sementara patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah agar mendapatkan dukungan dari mereka (Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi 2020). Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Politik uang merupakan perusak utama demokrasi dimana cita-cita luhur demokrasi akan ternodai jika politik uang dilakukan oleh para calon pemimpin. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran ekstra dari masyarakat untuk memahami bahwa politik uang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, bahkan justru mendatangkan kerugian. Pemimpin yang sedari awal telah memulai cara-cara curang dalam mendapatkan suara, tentu akan melakukan cara-cara curang lebih banyak lagi setelah memimpin.

Masyarakat harus sadar betul, bahwa nasib mereka 5 tahun mendatang ditentukan dari memilih pemimpin yang amanah, jujur serta adil. Pada Pemilu 2024 ini, salah satu cara yang diupayakan dalam mencegah terjadinya politik uang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari politik uang, maka Program Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengadakan Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) dengan mengutus para mahasiswa untuk terjun langsung ke berbagai daerah sesuai domisili mereka, dimana mereka ditugaskan untuk mengawal jalannya pemilihan umum secara jujur dan adil.

Salah satu tugas mereka adalah memastikan bahwa pemilihan umum yang dilangsungkan di wilayah domisili mereka berjalan secara bersih tanpa adanya politik uang. Mahasiswa dalam hal ini juga harus secara giat mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pemilu yang bersih tanpa politik uang. Hal ini perlu dilakukan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum begitu sadar akan hal ini.

Tujuan utama dari adanya Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) yang diadakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini adalah dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu 2024 yang berintegritas, bersih, dan demokratis.

Dalam program yang melibatkan mahasiswa ini, nantinya mahasiswa akan melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024, melakukan berbagai sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu, memantau aktivitas kampanye dan menyerukan tolak politik uang (Fasilitator Program Kaliber 2024). Salah satu daerah yang juga menjadi sasaran dari Program Kaliber adalah Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sama seperti kelurahan lainnya, kelurahan Koto Panjang juga akan melaksanakan Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024, oleh karenanya anggota program Kaliber juga ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di Kelurahan Koto Panjang ini dapat berjalan secara bersih, bebas politik uang dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan bahayanya politik uang.

Adapun penelitian ini akan membahas seputar pelaksanaan Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) yang dilaksanakan di Kelurahan Koto Panjang yang secara umum akan membahas dua hal sebagai fokus pembahasannya yaitu, pertama, bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) di Kelurahan Koto Panjang. Kedua, hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) di Kelurahan Koto Panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Mulyana 2004). Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang tujuan utamanya adalah memperoleh informasi (Nasution 2006). Adapun dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen terkait pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Koto Panjang. Adapun sumber data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber tersier dalam penelitian ini terdiri kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif di mana data yang telah terkumpul dan dianalisis, selanjutnya akan diverifikasi (ditarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sosialisasi Dalam Program Kaliber Di Kelurahan Koto Panjang

Sebagaimana telah dijelaskan secara sepintas pada sub bab sebelumnya, pelaksanaan program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan pemilihan umum 2024 secara jujur, adil, bersih sesuai dengan asas demokrasi. Adapun hal penting yang perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak demi terlaksananya Pemilu yang jujur, adil dan bersih ini adalah bahaya politik uang. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan program Kaliber ini, Kelompok 13 Program Kaliber yang bertugas di Kelurahan Koto Panjang melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait bahaya politik uang.

Politik uang pada dasarnya merupakan perbuatan yang menciderai demokrasi dan merupakan akar dari korupsi (Adiwidjaya 2013). Secara yuridis praktik politik uang bertentangan dengan aturan hukum yang ada, dimana dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Adapun sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Arif Awaludin 2021).

Oleh karenanya, penting sekali untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak mengenai bahaya dari adanya politik uang. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan pada Program Kaliber di Kelurahan Koto Panjang ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan posko Kelompok 13

Posko Kaliber kelompok 13 berpusat di Sekretariat Bersama Kantor Lurah Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Pendirian posko ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan banyak pihak, terutama masyarakat jika ada yang ingin berkonsultasi mengenai Pemilihan Umum atau jika ada yang ingin memberikan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.



Gambar 1 Pendirian Posko Kaliber

2. Pemasangan Spanduk Program Kaliber

Guna mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, maka kelompok 13 juga melakukan pemasangan spanduk di Kelurahan Koto Panjang yang isinya berupa himbauan untuk menghindari politik uang dalam berbagai bentuk. Spanduk berisi himbauan dan edukasi mengenai politik uang ini disebar di beberapa titik di Kelurahan Koto Panjang seperti di bahu-bahu jalan agar masyarakat mudah untuk membacanya.



Gambar 2 Pemasangan Spanduk Program Kaliber

3. Penyerahan surat tugas Kawal Pemilu Bersih serta serah terima Surat Penugasan Kaliber ke Bawaslu Kota Padang Panjang

Adapun tujuan dari penyerahan surat tugas Kawal Pemilu Bersih ke Bawaslu Padang Panjang ini adalah agar kelompok 13 Kaliber dapat secara bersinergi berkerjasama dengan Bawaslu Kota Padang Panjang maupun Panwaslu Kecamatan untuk menyelidiki dan mencegah terjadinya praktik politik uang selama berjalannya Pemilihan Umum 2024. Surat tugas ini juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi kelompok-kelompok Kaliber dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

4. Ikut serta dalam seruan Aksi Damai Civitas Akademika FH UM Sumatera Barat Deklarasi Tolak Politik Uang

Salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh kelompok 13 Kaliber yang bertugas di Kelurahan Koto Panjang adalah turut serta dalam aksi damai civitas akademika FH UMSB yang isinya mendeklarasikan penolakan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Aksi damai ini berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat menjadi perhatian bagi masyarakat sekaligus bentuk sosialisasi bagi masyarakat akan bahayanya politik uang bagi masa depan bangsa.

5. Penyerahan Surat Himbauan Tolak Politik Uang kepada beberapa Pengurus Masjid di Kelurahan Koto Panjang
Penyerahan surat himbauan tolak politik yang ini diberikan kepada pengurus masjid di Kelurahan Koto Panjang yang isinya berupa himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menolak berbagai bentuk politik uang baik dalam bentuk serangan fajar, pemberian amplop dan lain sebagainya oleh oknum-oknum tertentu. Surat himbauan ini diberikan kepada pengurus masjid untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat jama'ah shalat jum'at yang datang ke masjid.
6. Pelaksanaan sosialisasi tolak politik uang kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Koto Panjang
Sosialisasi juga dilakukan pada ibu-ibu PKK Kelurahan Koto Panjang dengan mendatangi kelompok PKK secara langsung dan memberikan himbauan untuk menolak secara tegas jika ada tawaran politik uang dari berbagai oknum yang ada.
Pada sosialisasi ini kelompok 13 juga memberikan pemahaman dan edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan Pemilu yang bersih bagi masa depan rakyat lima tahun ke depan. Dengan sosialisasi yang diberikan, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat meningkat akan bahayanya politik uang.



Gambar 3 Pelaksanaan Sosialisasi Politik dengan PKK Kel. Koto Panjang

7. Tanya Jawab dengan lurah Koto Panjang seputar Pelaksanaan Pemilu 2024
Kelompok 13 Program Kaliber juga melaksanakan diskusi dalam bentuk tanya jawab dengan Lurah Koto Panjang seputar pelaksanaan Pemilu 2024 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu yang bersih serta tantangan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 ini.
8. Melakukan edukasi tentang politik uang kepada masyarakat sekitar
Selain melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya politik uang kepada kelompok-kelompok masyarakat dan juga ASN. dalam program Kaliber ini kelompok 13 juga melaksanakan sosialisasi door to door dengan mendatangi beberapa rumah masyarakat sekitar untuk memberikan edukasi dan pemahaman betapa bahayanya politik uang serta menghimbau masyarakat untuk secara tegas menolak jika ada yang menawarkan politik uang dalam bentuk apapun. Adapun pada ASN disosialisasikan mengenai keharusan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024.



Gambar 4 Edukasi Kepada Masyarakat

9. Melakukan sosialisasi tentang politik uang ke warung kopi dan pangkalan ojek
Sebagaimana diketahui bersama, warung kopi merupakan salah satu tempat dimana masyarakat biasanya berkumpul dan berdiskusi mengenai berbagai hal. Oleh karenanya, warung kopi menjadi tempat yang strategis untuk melaksanakan sosialisasi secara lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang. Kelompok 13 dalam hal ini melakukan sosialisasi di beberapa warung kopi yang ada di Kelurahan Koto Panjang dengan pendekatan yang santai sehingga diskusi berjalan dengan lancar dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat bersikap terbuka terhadap himbuan yang diberikan. Sosialisasi yang sama juga dilakukan di beberapa pangkalan ojek, mengingat pangkalan ojek juga merupakan titik kumpul yang cukup ramai.



Gambar 5 Sosialisasi tolak politik uang di Warkop dan Pangkalan Ojek

10. Melakukan kampanye tolak politik uang melalui media sosial
Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kelompok 13 juga melakukan sosialisasi tolak politik uang melalui lini media masa. Media masa yang digunakan di antaranya adalah Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Dengan sosialisasi melalui media masa, diharapkan jangkauan sosialisasi yang dilakukan bisa lebih luas.
11. Pengisian Kuisisioner kepada masyarakat tentang Anti Politik Uang
Salah satu upaya yang dilakukan Kelompok 13 Kaliber untuk mengawal pelaksanaan Pemilu yang bebas politik uang adalah dengan menyebar kuisisioner kepada masyarakat yang isinya berupa sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan politik uang. Dari sejumlah jawaban yang diberikan oleh masyarakat melalui kuisisioner yang diberikan, maka didapat kesimpulan bahwa secara umum masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap program Kaliber yang mengusung tema tolak politik uang.

12. Kunjungan DPL dalam rangka penilaian dan evaluasi kegiatan Kaliber di Kelurahan Koto Panjang

Adapun kunjungan DPL ini dilakukan untuk memastikan bahwa program Kaliber yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Kaliber berjalan dengan benar dan sesuai dengan arahan, termasuk kelompok 13 yang bertugas di Kelurahan Koto Panjang.



Gambar 6 Kunjungan DPL

Demikianlah beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai pihak untuk mengkampanyekan tolak politik uang pada Pemilu 2024 yang dilakukan oleh kelompok 13 Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber). Dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan masyarakat semakin meningkat kesadarannya akan bahaya dari politik uang sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur, adil dan bersih.

Terkait beberapa bentuk sosialisasi yang kelompok 13 Program Kaliber lakukan, maka kelompok 13 juga mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengetahui respon terhadap kegiatan ini. Adapun hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Kelurahan Koto Panjang merespon positif terhadap kegiatan yang dilakukan mulai dari sosialisasi ke rumah-rumah, ke kelompok PKK, Kedai kopi, pangkalan ojek dan juga himbauan-himbauan di masjid-mesjid. Rata-rata masyarakat juga sudah cukup memahami bahaya politik uang dan mendukung gerakan tolak politik uang (Hasil Wawancara dengan Masyarakat Koto Panjang, Februari 2024).

Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) Di Kelurahan Koto Panjang

Dalam upaya mengawal Pemilu 2024 yang jujur, adil dan bersih di Kelurahan Koto Panjang, kelompok 13 Program Kaliber tentunya menghadapi berbagai macam hambatan/kendala. Adapun beberapa kendala yang ditemui dalam upaya mengawal Pemilu 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilu serentak dengan Pilkada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan berbagai kewajiban dan persiapan yang lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, DKPP, DPD, dan instansi terkait lainnya.
2. Adanya politik identitas, politik uang, netralitas ASN/TNI/POLRI yang dilarang terlibat kampanye dan penyebaran berita hoaks. Hal-hal ini dapat mengganggu proses pemilihan yang adil, transparan dan demokratis.
3. Masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan persiapan pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel. Hal-hal ini dapat mempengaruhi kualitas serta legitimasi dari hasil pemilihan umum.

Demikianlah beberapa hambatan yang ditemui selama pelaksanaan tugas mengawal Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Kelompok 13 Program Kaliber. Adapun beberapa hambatan

yang ditemui diatas, setelah diidentifikasi, maka oleh Kelompok 13 dicarikan solusinya dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi hambatan terkait kewajiban dan persiapan Pemilu 2024 yang kompleks, Kelompok 13 Program Kaliber turut memberikan bantuan dan juga turut berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk senantiasa memberikan bantuan.
2. Untuk mengatasi hambatan berupa politik identitas politik uang dan masalah netralitas ASN/TNI/POLRI, maka kelompok 13 melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi kepada berbagai pihak untuk menolak politik uang, untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, untuk tidak terpengaruh isu SARA dan berita Hoaks.
3. Untuk mengatasi hambatan terkait transparansi, maka kelompok 13 senantiasa melakukan pengawalan terhadap jalannya pesta demokrasi ini dan membuka posko tersendiri yang dapat menampung keluhan, aduan maupun laporan jika terdapat indikasi terjadinya kecurangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber) di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang telah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yaitu untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bersih dan demokratis.

Dalam pelaksanaan proram ini kelompok 13 Program Kaliber telah melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk memastikan masyarakat terhindar dari adanya politik uang yang membahayakan. Adapun masyarakat juga bersikap terbuka dan merespon secara positif terhadap program ini. Sekalipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, namun pada akhirnya dapat dicarikan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. 2021. "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1 (2): 142–59.
- Adiwidjaya, Dody Setiawan dan Ignatius. 2013. "Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang." *Jurnal Reformasi* 3 (2): 90–95.
- Arif Awaludin. 2021. *Bahaya Politik Uang Dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum Di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)*. Purwokerto: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM) Purwokerto.
- Bintar R. Siragih. 1998. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Fasilitator Program Kaliber. 2024. *Buku Panduan & Log Book Kawal Pemilu Bersih*. Sumatera Barat: LUHAK FH UM Sumbar.
- Feri Amsari Dkk. 2021. *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang: Laporan Hasil Riset Peneliti Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6 (1): 141–52.
- Mulyana, Dedi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Haris. 1997. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Umar, Mashudi. 2015. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam." *Atturas* 1 (1): 107.